

IFRS, KONSENSUS AKUNTANSI DAN IMPLIKASINYA

UNTUK PENDIDIKAN AKUNTANSI

Oleh: Hermadi Widijanto

Intisari: Studi ini ditujukan untuk melihat kesiapan pendidikan Akuntansi dalam mempersiapkan para akuntan untuk melakukan migrasi dasar akuntansi, dari US GAAP kepada IFRS. Kebutuhan migrasi ini dipicu dengan terbukanya perdagangan Global, yang menyebabkan terbukanya peluang pasar yang semakin besar dan luas, hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan baru dari segi pelaporan akuntansi.

Bagi perusahaan multi nasional yang memiliki cabang di berbagai Negara yang memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda, masalah pelaporan keuangan menjadi suatu kendala tersendiri. Manajemen berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dapat diperbandingkan, hal ini tentu tidak bisa didapatkan jika kebijakan akuntansi di berbagai Negara berbeda.

Isu perbandingan inilah yang mendorong dibentuknya suatu kebijakan akuntansi global, yang memiliki standar yang sama, dimanapun laporan keuangan tersebut diterbitkan, sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbandingan laporan keuangan.

Isu di atas tidak dengan mudah bisa dicapai, karena untuk bisa diseragamkan maka pemahaman akuntanpun harus sama, pendidikannya pun memiliki kurikulum yang sama, universitas yang menghasilkan akuntan, harus memiliki keseragaman menu pendidikan sehingga pembelajaran ini bisa dicapai.

Kompilasi ini dilakukan pada 5 negara Asean yang memenuhi syarat bagi penerapan IFRS, dan menjadi tantangan bagi Negara-negara tersebut untuk dapat menyediakan akuntan yang mampu berbahasa IFRS

Kata kunci: IFRS, Keterbandingan, Konsensus Akuntansi, Pendidikan Akuntansi

I. PENDAHULUAN

Kefektifan pasar dunia ini sangat tergantung pada penyajian informasi keuangan yang transparan, tepat waktu, memiliki daya banding dan relevan. Bukan hanya investor dan analis yang membutuhkan informasi seperti ini, tetapi juga stakeholder lainnya (pekerja, suppliers, customers, institusi penyedia credit, bahkan pemerintah), tetapi pertanyaannya ialah bagaimana kebutuhan ini bisa terpenuhi jika perusahaan-perusahaan masih memakai tata cara, bentuk dan

prinsip pelaporan keuangan yang berbeda-beda?, Amerika memakai FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, Uni Eropa memakai IAS dan IASB. Solusi yang ditawarkan oleh Muller (Mueller 1963: 145) adalah dengan 1) membangun prinsip-prinsip akuntansi internasional, 2) membentuk badan internasional otoritas akuntansi yang permanen, 3) mendiskusikan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan pada skala yang lebih luas. Itulah kira-kira yang melatar belakangi timbulnya gaung untuk mengadopsi IFRS belakangan ini.

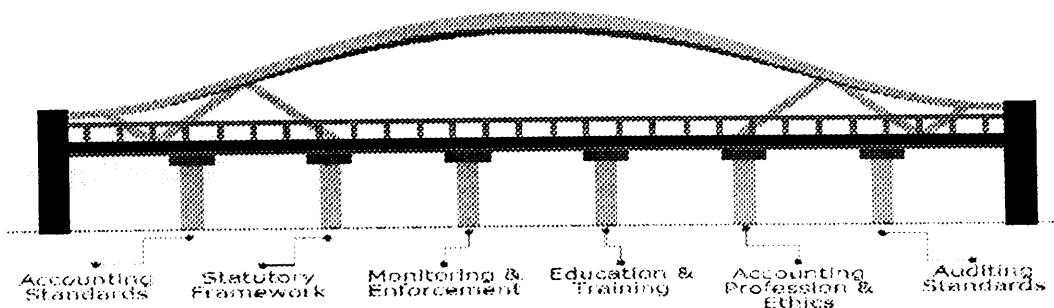
Adopsi IFRS dan perubahan dari GAAP ke IFRS saat ini menjadi suatu fenomena global yang merupakan suatu langkah yang cepat. Australia, Russia, masyarakat Eropa, beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah, dan negara lainnya telah memberikan mandatori untuk perubahan menuju IFRS, sementara Amerika Serikat, Afrika Selatan, Singapura dan Malaysia, yang masih komit pada standar lokal, dan menggunakan standar internasional sebagai pembanding.

Bagi pengusaha pada umumnya, yang menjadi bahan pertimbangan apakah akan beralih ke IFRS atau tidak adalah “Apakah implementasi IFRS akan menghasilkan *incremental benefit* atau tidak?”. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go international memiliki cabang-cabang diluar negeri, atau yang memiliki partner dari Uni Eropa, Australia dan Russia dan beberapa Middle East countries, tentu sudah tidak punya pilihan lain selain “mau tidak mau harus mulai berusaha menerapkan IFRS” dalam pelaporan keuangannya jika masih mau berpartner dengan mereka..

Perubahan tata cara pelaporan keuangan dari GAAP (atau PSAK atau lainnya) ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi “kompetensi wajib-baru” bagi para pekerja accounting.

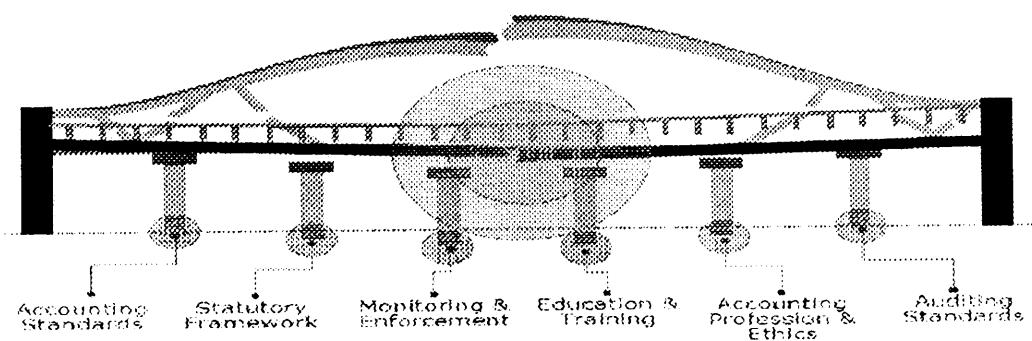
Sebuah tulisan David Nagy dalam Strategy and Action Plan,to Enhance Corporate Financial Reporting in Bosnia and Herzegovina, dia mengatakan bahwa infrastruktur pelaporan keuangan yang penting tidak hanya penetapan standar, selengkapnya ada enam pilar yang mendukung infrastruktur pelaporan keuangan yaitu: 1) Accounting Standards, 2) Statutory Framework, 3)Monitoring & Enforcement, 4)Education & Training, 5)Accounting Profession & Ethics dan 6) Auditing Standards, sebagaimana digambarkan dalam gambar 1.

Importance of the financial reporting infrastructure not just standards



Pilar ke empat adalah merupakan salah satu pilar yang penting, yang dapat menopang infrastruktur pelaporan keuangan. Para praktisi dan akademisi tidak bisa hanya memberikan sebelah mata untuk pendidikan dan pelatihan, karena dari sinilah akan dilahirkan para praktisi dan akademisi yang akan melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang IFRS. Pilar Pendidikan dan pelatihan harus difasilitasi dan didukung untuk bisa berkembang selaras dengan pilar-pilar yang lain. kita bisa bayangkan jika pilar pendidikan dan pelatihan tidak mendapatkan perhatian yang serius, maka yang bisa terjadi adalah seperti gambar 2, berikut ini.

All pillars need to be strengthened

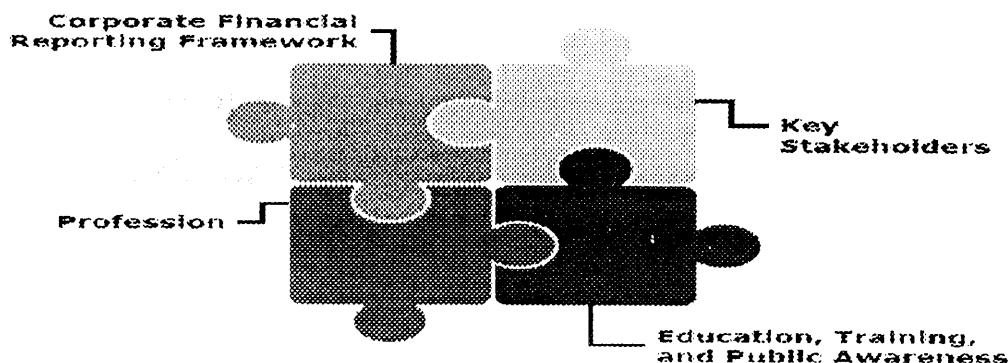


“Mengubah *accounting curriculum* bukanlah pekerjaan mudah, menyangkut banyak aspek. Apakah anda pikir para *decision maker curriculum* yang nota bena-nya adalah para guru besar akuntansi yang sebentar lagi sudah akan memasuki masa retired (pensiun) akan bersedia menunda masa pensiunnnya hingga universitas sepenuhnya *IFRS ready*? No way, bahkan mungkin mereka akan memilih mempercepat masa pensiunnnya! ”

Tetapi disisi lain komentar seorang dosen, ”Saya seorang dosen akuntansi dari negara bagian Maryland, kebetulan saya seorang guru besar, setahu saya, kami para dosen bukanlah

orang yang berpikiran sempit, kami siap menunda masa pensiun, begitu kami mendapat statement resmi dari bahwa FASB, SEC dan AICPA akan mengikuti IFRS". Rupanya kalangan akademisi di United State masih "*wait and see*" sikap resmi dari institusi yang mereka anggap sebagai kiblat. Tetapi setidaknya mereka siap untuk menunda masa pensiun untuk kepentingan generasi penerus mereka.

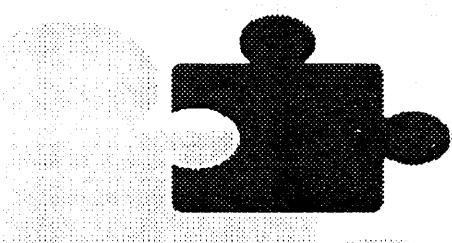
Bagaimana dengan bapak-ibu dosen, guru besar, para tetua akuntansi, serta para penyelenggara



Pendalaman Profesi Akuntansi, penyelenggara USAP, di Indonesia dan negara asean yang terhormat? Apakah ada yang belum sempat membaca ketentuan-ketentuan IFRS? Apakah anda pernah berpikiran untuk pelan-pelan mulai mengganti bahan ajar akuntansi kita menjadi berbasis IFRS-principles walaupun mungkin masih memakai GAAP-rules sedikit-sedikit? :-)

Keterpaduan untuk bisa menghasilkan informasi yang memiliki daya banding, akurat, relevan dan tepat waktu membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Kerangka pelaporan keuangan perusahaan yang sudah mengadopsi ketentuan internasional diharapkan dapat dibaca

Education, Training, Public Awareness



- **Support to the Third Level Accountancy Curriculum**
- **Support Implementation of an Improved Third Level Curriculum**
- **Training for the Judiciary**
- **Public Awareness Program**

dan dimengerti dengan baik oleh stakeholder. Apa yang disajikan telah sesuai dengan ketentuan profesi yang mengaturnya, dan tentunya bagi penyedia informasi (akuntan) harus mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai, untuk mampu menyediakan informasi yang

dibutuhkan, dengan demikian akan bisa diharapkan adanya peningkatan nilai perusahaan yang tergambar pada nilai saham, karena informasi yang disajikan memang bermanfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Berpindah dari “GAAP” ke “International Financial Reporting Standards” akan berdampak besar terhadap cara berpikir kita dalam memahami akuntansi. Mulai dari university, accounting course hingga corporate level, hendaknya dilihat sebagai tantangan bersama bagi kita semua (para pegiat accounting dan para akademisi).

Major accounting schools - the Universities of Texas, Illinois and Wisconsin - will teach IFRS, kata Larry Rittenberg, Ph.D., Ernst & Young professor, University of Wisconsin. Hampir semua universitas yang menyelenggarakan jurusan akuntansi di semua negara bagian amerika serikat telah memiliki kelas khusus IFRS, katanya, seperti di lansir oleh Financial executive online. Michael Cangemi (President dan CEO dari FEI) mengatakan dalam tulisannya di “March issue” : *“This means that all of the GAAP books you own, everything you learned in college and in your entire career will change”*.

Bagaimana dengan negara-negara ASEAN yang mulai satu persatu membuat komitment untuk mengadopsi IFRS dalam standar akuntansi nasionalnya masing-masing sebagaimana tuntutan dunia global sebagai konsekuensi dari persaingan global apakah pendidikan tinggi mereka sudah membuat persiapan untuk itu? Apakah mereka sudah memperkenalkan dan memberikan bekal pengetahuan tentang IFRS pada mahasiswanya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan lembaga pendidikan akuntansi (formal dan non formal) dalam mempersiapkan program pendidikan untuk menghasilkan akuntan yang siap berkiprah dalam rencana adopsi IFRS dinegara-negara Asean.

Permasalahan dinyatakan dalam pertanyaan berikut ini: Apakah lembaga pendidikan tinggi di Asean telah merespon adopsi IFRS dengan menyesuaikan kurikulum yang dapat menyiapkan calon-calon akuntan dalam globalisasi?

Lingkup dan Keterbatasan

ASEAN mempunyai 10 negara anggota yaitu Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, Brunei, Vietnam dan Myanmar, Laos dan Cambodia.

Beberapa informasi berikut yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak semua anggota negara ASEAN digunakan dalam penelitian ini:

- ❖ Laos dan Cambodia tidak menjadi anggota Asean Federation of Accountant (AFA)
- ❖ Mallory (2000) Vietnam mempunyai masalah besar dalam system informasi dan audit. Brunei mempunyai perkembangan akuntansi yang kurang sejak badan profesi akuntansinya gagal mengorganisir profesi akuntansi di negaranya dan juga tidak ada standar akuntansi lokal di Brunei. Kurangnya informasi akuntansi di Myanmar.
- ❖ Tidak ada pasar modal Brunei dan Cambodia.
- ❖ Hanya ada 1 universitas di negara Brunei, Cambodia, Laos dan Myanmar.

Saudagaran and Diga (2000) menemukan hanya lima negara yang mempunyai akuntansi dan institusi yang mengaturnya dan standar akuntansi nasional yang lebih berkembang yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Pilipina dan Thailand. Berdasarkan data di atas kami memutuskan memilih lima negara tersebut sebagai sampel.

Keuntungan (kelebihan) jika mengadopsi IFRS

Keuntungan utama dari pengadopsian IFRS adalah meningkatkan daya banding laporan keuangan sehingga memungkinkan perusahaan multinasional melewati batas negara (Saudagaran, 2001). Bagi investor asing, pengadopsian IFRS akan membuat mereka menjadi lebih mudah memahami laporan keuangan perusahaan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi tersebut. Hal ini tidak dimungkinkan bila standar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut tidak dikenal oleh investor. Empat kantor akuntan besar, selanjutnya mengatakan bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan dalam rangka memenuhi maksud mereka memasuki pasar modal dunia (global).

Bagi perusahaan multinasional, keuntungan pengadopsian IFRS dapat ditinjau dari dua segi: dari segi biaya dan segi *cost of capital*. Dari segi efisiensi biaya, perusahaan multinasional tidak perlu membuat *multiple reporting* untuk memenuhi kebutuhan investor dalam negeri maupun luar negeri. Dengan satu standar (IFRS) yang telah diakui oleh banyak bursa saham di dunia, maka perusahaan hanya cukup membuat satu versi saja yang sangat menghemat biaya perusahaan. Dari segi *cost of capital*, perusahaan akan memperoleh manfaat murahnya biaya modal perusahaan karena kepercayaan investor menjadi semakin tinggi. Tingginya kepercayaan ini tidak lepas dari semakin mudahnya laporan keuangan dipahami dan semakin rendahnya asimetri informasi. Keuntungan lain diperoleh negara yang tidak mempunyai sumberdaya yang cukup untuk menyusun standar yang bermutu sehingga lebih baik mengadopsi standar internasional yang sudah ada daripada membuat sendiri. IFRS merupakan standar yang proses

penyusunannya telah melewati tahap yang panjang sehingga standar tersebut tidak diragukan lagi untuk diadopsi.

Dampak penerapan IFRS terhadap Pendidikan di Negara-negara ASEAN

Program harmonisasi standar akuntansi yang dilakukan oleh negara ASEAN tentu saja akan berpengaruh terhadap pendidikan akuntansi di perguruan tinggi yang ada di negara tersebut. Dengan demikian pembekalan pengetahuan tentang akuntansi internasional, dimana harmonisasi adalah salah satu isu yang dipelajari, tentu saja perlu dilaksanakan.

Berikut ini adalah syarat untuk menjadi akuntan publik di negara-negara Asean yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Persyaratan Menjadi Akuntan Publik di Negara-negara ASEAN

Negara	Persyaratan		
	Pendidikan	Keahlian	Pengalaman Praktek Minimum
Indonesia	Ya	Ya	5 tahun
Malaysia	Ya	Tidak*	3 tahun
Philipina	Ya	Ya	3 tahun
Singapura	Tidak*	Tidak*	Tidak Ada
Thailand	Ya	Ya	1.000 dalam 1 tahun

* Disyaratkan bagi akuntan yang ingin menjadi anggota MACPA (Malaysia) atau ICPAS (Singapura) yang dikenal sebagai Certified Public Akuntan

Sumber: Favere – Marchesi, 2000 129)

Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah materi tersebut akan diberikan dalam satu matakuliah tertentu, atau cukup dimasukkan kedalam salah satu matakuliah yang telah ada. Misalnya, topik-topik akuntansi manajemen internasional, transfer pricing, dan pengukuran prestasi dapat dimasukkan kedalam matakuliah akuntansi manajemen. Kalau dijadikan matakuliah tersendiri apakah sebagai matakuliah wajib atau pilihan, dan apa matakuliah pra-

syaratnya. Lebih jauh lagi apa tujuan dari pengajaran akuntansi internasional dan apa saja isi (contents) dari matakuliah tersebut.

Di US, Akuntansi Internasional telah dijadikan sebagai salah satu pra-syarat untuk mendapatkan akreditasi American Assembly of Collegiate School of Business (AACSB) sejak tahun 1974 (Sands & Pragasam, 1993), walaupun sebenarnya beberapa universitas di sana telah mulai memberikan materi ini sejak awal 1960an (Gray & Roberts, 1984). Di UK, matakuliah Akuntansi Internasional tidaklah harus dimasukkan kedalam kurikulum, tapi topik-topik yang berhubungan diberikan pada matakuliah akuntansi lainnya, dan menurut Mintz (1980) inilah yang ideal. Artinya, semestinya, menurut Mintz, tujuan jangka panjang adalah semua matakuliah akuntansi yang bersifat domestik perlu di internasionalisasikan. Kalau internasionalisasi seluruh matakuliah akuntansi telah bisa dilakukan, tidak perlu lagi ada matakuliah akuntansi internasional secara khusus. Karenanya Mintz mengatakan bahwa pemberian secara khusus matakuliah akuntansi internasional adalah suatu langkah awal sebelum para akuntans akademisi mampu untuk menginternasionalisasikan seluruh matakuliah akuntansi.

Di Australia, Akuntansi Internasional tidaklah merupakan suatu pra-syarat bagi keanggotaan organisasi profesi akuntan. Dengan demikian hanya beberapa universitas saja yang memasukkan ini sebagai matakuliah di program bachelor, misalnya Griffith University di Brisbane (Sands & Pragasam, 1993). Akan tetapi untuk program master , semua universitas baik di US, Eropa atau Australia menjadikan Akuntansi Internasional sebagai suatu matakuliah tersendiri.

Sejak Akuntansi Internasional pertama kali diberikan di universitas yaitu pada tahun 1963 di University of Illinois at Urbana-Champaign, setiap universitas merumuskan sendiri tujuan paedagogik dari pengajaran mata-kuliah ini (Sands & Pragasam, 1993; Conover et al.. 1994). Tentu saja perbedaan dalam tujuan ini menimbulkan pula perbedaan pada rancangan mata-kuliah itu sendiri. Isu rancangan matakuliah ini telah menjadi objek penelitian sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dimana setiap penelitian itu mencoba mengurutkan topik-topik yang dianggap penting oleh partisipan (pihak yang diteliti) untuk diberikan. Conover et al. (1994) mengungkapkan bahwa penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan atas dua. Pertama yang menjadikan para akademisi sebagai partisipan dalam penelitiannya; topik apa yang diduga penting oleh para akademisi. Kedua, yang mengungkapkan pandangan para akuntan praktisi: topik apa yang diduga penting oleh para praktisi. Menurut Conover et al. (1994), pada kelompok pertama mereka merekomendasikan topik-topik berikut ini:

- ❖ Akuntansi Translasi Internasional (Transalation Accounting).
- ❖ Praktek Perbandingan Pelaporan Keuangan (Comparative Financial Reporting Practices).
- ❖ Harga Transfer (Transfer pricing.)
- ❖ Standar Akuntansi Inflasi. (Accounting Inflation Standar)

Penelitian yang partisipannya adalah para manajer merekomendasikan topik-topik *transaction accounting and foreign exchange risk management*, perpajakan, pembiayaan (financing) perusahaan multinasional, dan *foreign financial statements*. Bagi para manajer topik-topik disklosur, etika, akuntansi inflasi dan harmonisasi tidaklah merupakan isu yang penting. Walaupun mereka memberikan rekomendasi yang berbeda, kedua kelompok penelitian ini sepakat bahwa akuntansi translasi merupakan topik yang terpenting. Perbedaan persepsi antara para akademisi dan praktisi ini adalah masalah lama. Para akademisi berpendapat bahwa mereka tidaklah harus mengikuti keinginan para praktisi, tapi haruslah bersikap pro-aktif (Conover et al., 1994, p. 261). Topik-topik lain yang direkomendasikan oleh kedua kelompok penelitian tersebut adalah, misalnya, perbedaan metodologi akuntansi, pola-pola pengembangan akuntansi, manajemen modal kerja dan kas, serta analisis investasi asing (lihat Sands & Pragasm, 1993). Sands & Pragasm sendiri melakukan penelitian dengan meminta pendapat dari para mahasiswa matakuliah akuntansi internasional pada program bachelor di Universitas Griffith, Australia. Penelitian ini melaporkan ranking berdasarkan manfaat dari topik-topik tersebut menurut mahasiswa.

Kubin (1973), dalam Sands & Pragasm, 1993, memberikan suatu rekomendasi yang penting, yaitu dia mengatakan bahwa pendidikan Akuntansi Internasional haruslah mempertimbangkan empat hal: (1) kebutuhan mahasiswa untuk siapa matakuliah itu diperuntukkan, (2) matakuliah akuntansi internasional itu adalah merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan matakuliah yang diberikan, (3) persepsi dari masyarakat bisnis dan akuntan praktisi terhadap permasalahan akuntansi internasional, (4) persepsi dari para pengajar atas apa yang seharusnya diketahui oleh para mahasiswa. Kegagalan untuk mempertimbangkan salah satu dari ke empat hal ini akan menyebabkan kegagalan dalam pendidikan akuntansi internasional (Sands & Pragasm, 1993).

Hal lain yang juga menjadi perhatian bagi para peneliti pendidikan akuntansi internasional adalah kesiapan para pengajar. Di negara yang pendidikan akuntansinya telah maju sekalipun, pendidikan akuntansi internasional mengalami hambatan kekurangan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengasuh matakuliah ini. Apalagi

akuntan akademisi yang berminat untuk memfokuskan penelitiannya pada akuntansi internasional masih langka. Kalau kita perhatikan penjelasan diatas tadi, untuk merancang kurikulum mereka terlebih dahulu perlu melakukan penelitian untuk mengetahui topik-topik apa saja yang relevan bagi mereka.

Adopsi IFRS di Negara-negara ASEAN

Untuk negara yang berkembang, ada empat strategi dalam penentuan standar yang digunakan (Belkaoui, 2004 dalam Kusuma, 2007). Strategi pertama adalah pendekatan evolusioner. Dalam pendekatan ini, negara berkembang membuat sendiri standar tanpa bantuan atau pengaruh dari luar. Strategi kedua adalah pendekatan transfer teknologi akuntansi. Dalam pendekatan ini, negara berkembang belajar dari negara maju sehingga terjadi transfer teknologi yang memungkinkan negara berkembang untuk membuat sendiri standar mereka. Strategi yang ketiga adalah mengadopsi standar internasional. Strategi ini yang sekarang paling banyak digunakan oleh negara berkembang. Strategi keempat adalah pendekatan situasional. Dalam pendekatan ini negara berkembang mempelajari standar negara maju dengan menganalisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju yang cocok dengan latar belakang di negara berkembang.

Tabel 2.2 Status IFRS pada negara-negara ASEAN

Country	Domestic Listed Companies					Domestic Unlisted
	IFRSs Not	IFRSs	IFRSs	IFRSs	Audit Report	Companies
	Permitted	Permitted	Required	Required	States	Use of IFRSs by
			for some	for All	compliance	Unlisted
					with IFRS	Company
Philippines	X	note 11				
Indonesia	X					IFRSs not Permitted
Malaysia	X					IFRSs not Permitted
Singapura	X	note 13				No. Singapore FRSs required note 3
Thailand	X					IFRSs not Permitted
Brunai Darussalam	No Stock exchange in Brunei					IFRSs are permitted but not often used
Vietnam	X					
Laos		X			Yes	
Cambodia	No Stock exchange in Cambodia					IFRSs are permitted but not often used
Myanmar		X			Yes	IFRSs Permitted

Sumber: <http://www.iasplus.com>

Note 11

In adopting IFRSs as Philippines Financial Reporting Standards (PFRSs), various modifications were made to IFRSs including the following 'transition relief':

- ◊ Reduced segment reporting disclosures
- ◊ Exemption from applying tainting rule for a specific set of financial instruments
- ◊ Commodity derivative contracts of mining companies as of 1 January 2005 'grandfathered'
- ◊ Insurance companies allowed to use another comprehensive set of accounting principles (also described as Philippine Financial Reporting Standards)

- ❖ For banks, losses from sale of non-performing assets allowed to be amortised over a period of time
- ❖ Some additional changes to IASB's pension, foreign exchange, and leases Standards

Note 13

Singapore has adopted national standards that are identical to IFRSs, including all recognition and measurement options, but in some cases effective dates and transition are different.

Companies that are based in Singapore but incorporated in another country are permitted to issue IFRS financial statement rather than Singapore GAAP Statement

Dalam table 2.2 kita lihat bahwa pada sebagian besar negara-negara ASEAN belum memperkenankan penggunaan IFRS didalam negaranya namun sebagian besar negara-negara ASEAN telah memasukkan standar internasional tersebut kedalam standar akuntansi keuangan negaranya misalnya Filipina dan Singapura sudah mengadopsi *word-by-word* IFRS. Untuk standar local, Malaysia dan Thailand sudah mengadopsi sebagian secara *word-by-word* IFRS sedangkan standar lainnya masih terdapat perbedaan. Indonesia berada pada tahap mengacu kepada IFRS dalam mengembangkan standar nasional (PSAK).

Analisa Badan Institusi Akuntansi di ASEAN

Pelaku proses penyusunan standar pada kawasan ASEAN dapat dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu Badan pemerintah dan Badan swasta. Badan ini bekerja bersama untuk mengatur standar akuntansi yang dapat diterima oleh semua pihak. Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 menunjukkan badan institusi yang terlibat dalam penyusunan standar di negara-negara ASEAN.

Table 2.3: Government Bodies Involve in Standard Setting

Organization	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand
Company law administrator	Investment Coordinating Board (BKPM)	Registrar of Companies	Securities and Exchange Commission	Registrar of Companies and Businesses	Ministry of Commerce-Commercial Registration
Securities market regulators	Capital Market Supervisory Agency (Bapepam)	Securities Commission	Securities and Exchange Commission	Monetary Authority of Singapore	Securities and Exchange Commission
Accounting Law administrator	-	-	-	-	Ministry of Commerce-Commercial Registration
Accountants registering body	Ministry of Finance	Malaysian Institute of Accountants	Professional Regulation Commission – Board of Accountancy	Public Accountants Board	Ministry of Commerce – Board of Supervision of Auditing Practice
Government sector bodies involved in standard-setting	Bank Indonesia Directorate of Taxation	Accountant General's Department of Malaysia	The Bangko Sentral ng Pilipinas, The Insurance Commission, The Public Svc Commission, The Bureau of Internal Revenue	Ministry of Finance	Bank of Thailand

Sumber: Saudagar dan Diga, 2000, Table 1, p. 4, di modifikasi

Table 2.4: Private Bodies Involve in Standard Setting

Organization	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand
Accounting Standard Setting Agency	Indonesia Institute of Accountants	Malaysia Accounting Standard Board	Accounting Standards Council	Institute of Certified Public Accountants of Singapore	Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand
Stock Exchange Authority	Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange	Kuala Lumpur Stock Exchange	Philippine Stock Exchange (Manila and Makati)	Stock Exchange of Singapore	Securities Exchange of Thailand
Professional Accounting Body	Indonesia Institute of Accountants	Malaysian Association of Certified Public Accountants	Philippine Institute of Certified Public Accountants	Institute of Certified Public Accountants of Singapore	Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand
Private Sector Body involved in Standard-Setting	Indonesia Chamber of Commerce and Industry	Malaysian Chamber of Commerce and Industry	Financial Executives Institute of the Philippines	Singapore Federation of Chambers of Commerce and Industry	Thai Chamber of Commerce
Audit Standard-Setting	Indonesia Institute of Accountants	Joint MIA and MACPA	Auditing Standards and Practices Council	Institute of Certified Public Accountants of Singapore	Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand

Sumber: Saudagar dan Diga, 2000, table 2, p. 5, di modifikasi

KESIMPULAN

Dalam sebuah iklan “Accounting Job Vacancies” sudah ada perusahaan yang mensyaratkan “IFRS Capability”. Dari kebutuhan itu baik praktisi maupun akademisi harus mempersiapkan pendidikan baru, yang memampukan seorang akuntan untuk bisa berbahasa IFRS, sehingga yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah:

Siapkah bidang pendidikan akuntansi menyediakan akuntansi di negara-negara ASEAN dalam menghadapi adopsi IFRS?

Hermadi Widijanto, MSc. MM. Ak
Adalah Dosen Tetap dan Kajur Akuntansi
Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia, Bandung

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Ashcroft Paul, Gia Chevis, L. Murphy Smith (2008). Advances in Accounting, incorporating in International Accounting 24 pp. 139-144
- Adhikari Ajay, Mary A. Flanigan, Rasoul H. Tondkar, A.(1999) Survey of International Accounting Education in the US and some other Countries. Journal of Accounting Education, pp. 175-189
- Albrecht, WS., DC. Clark, JM. Smith, KD. Stocks & LW. Woodfield (1994). An Accounting Curriculum for the Next Century, Issued in Accounting Education pp. 401-425.
- Bloom, R. & MA. Naciri. (1989). Accounting Standard Setting and Culture: A Comparative Analysis of the United States, Canada, England, West Germany, Australia, New Zealand, Sweden, Japan, and Switzerland, International Journal of Accounting pp. 70-97.
- Burchell, S., C. Clubb, AG. Hopwood & J. Hughes. (1980). The Roles of Accounting in Organizations and Society, Accounting, Organizations and Society pp. 5-27.
- Chandler, RA.(1992). The International Harmonization of Accounting: In Search of Influence. International Journal of Accounting, pp. 222-233.
- Choi, FDS & GG. Mueller. (1976). An Introduction to Multinational Accounting Englewood Cliffs: Praeger Publishers Inc.
- Doupnik, S. & ME. Taylor. (1985). An Empirical Investigation of the Observance of IASC Standards in Western Europe, Management International Review.
- Emenyonu, EN. & Gray, SJ., EC. (1992). Accounting Harmonisation: An Empirical Study of Measurement Practices in France, Germany and the UK., Accounting & Business Research 49-58.
- Evans, TG., ME. Taylor & OJ. Holzmann. (1994). International Accounting and Reporting. Cincinnati: South-Western Publishing Co.

- Fechner, HHE. & Kilgore, A. (1994). The Influence of Cultural Factors on Accounting Practice, International Journal of Accounting pp. 265-277.
- Favere Michael, Marchesi (2000), Audit Quality in ASEAN, The International Journal of Accounting vol 35 no.1 pp 121-149
- Goeltz, RK. (1991). International Accounting Harmonization: The Impossible (and unnecessary) Dream, Accounting Horizon pp. 85-88.
- Gokarn, RY., An Investigation into the Need for, Possibility of, and Means of Achieving International Harmonization of Accounting and Reporting Practices, PhD thesis at Georgia State University - College of Business Administration (Ann Arbor: University Microfilms International, 1984).
- Gray, SJ. & CB. Roberts. (Summer, 1984). International Accounting Education: A Survey of University Courses in the UK, Accounting and Business Research pp. 267-269.
- Heaston, PH. & HI Wolk. (1992). Toward the Harmonization of Accounting Standards: An Analytical Framework, International Journal of Accounting pp. 95-111.
- Hoarau, C. (1995). International Accounting Harmonization: American Hegemony or mutual recognition with benchmarks?, The European Accounting Review pp. 217-233.
- Hopwood, AG. (1994). Accounting and Everyday Life: An Introduction, Accounting, Organizations and Society pp. 299-301.
- Hopwood, AG. & P. Miller (eds). (1994). Accounting as Social and Institutional Practice. Cambridge; Cambridge University Press.
- Kubin, KW. (1973). The Changing Nature of International Accounting Courses, International Journal of Accounting Education & Research, pp. 99-111.
- Kusuma, IW (2007) Pengadopsian *International Financial Reporting Standards*: Implikasi Untuk Indonesia Pidato Pengukuhan pada Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada
- Miller P. & Napias, C. (1993). Genealogies of Calculation, Accounting, Organizations and Society. pp. 631-674.
- Mueller G. G.(1963). The Dimension of the International Accounting Problem. The Accounting Review, vol. 38, no.1 pp.142-147
- Nagy David, Strategy and Action Plan to Enhance Corporate Financial Reporting in Bosnia and Herzegovina, *Corporate Financial Reporting Specialist Europe and Central Asia Region*

- Nobes, C. & R. Parker. (1995). Comparative International Accounting. New York: Prentice Hall.
- Rezaee Zabihilloh, Joseph Z. Szendy and Robert C. Elmore (1997) International Accounting Education: Insights from Academicians and Practitioners, *The Journal of Accounting* vol. 32, no.1 pp 99-117
- Rasyid, ER. (1994). Researching Management Accounting-In-Action: Interpretive Anthropology as a Methodological Discretion, *The Indonesian Journal of Accounting and Business Society*.
- Rivera, JM. (1989). The Internationalization of Accounting Standards: Past Problems and Current Prospects, *International Journal of Accounting* pp. 320-341.
- Samuels, J.M. & A.G. Pipers. (1985). International Accounting: A Survey. Croom Helm.
- Sands, JS. & J. Pragasam. Students' Perceptions of the Usefulness of International Accounting Course Contents: An Australian Study, *International Journal of Accounting* (1993) pp. 325-334.
- Saudagaran, Shahrokh M, and Diga, Joselito G (1998) Accounting Harmonization in ASEAN: Benefits, models, and policy issues. *Journal of Accounting Auditing & Taxation*, vol. 7, issue 1, 21-45.
- Saudagaran, Shahrokh M, and Diga, Joselito G. (1997) Accounting regulation in ASEAN: A choice between the global and regional paradigms of harmonization. *Journal of International Financial Management and Accounting*, vol. 8, issue 1, 1-32.
- Saudagaran, Shahrokh M, and Diga, Joselito G (2000) The Institutional Environment of Financial Reporting Regulation in ASEAN, *The International Journal of Accounting*.. vol. 35, issue 1, 1-26.
- Saudagaran, Shahrokh M., and Diga, Joselito G. (1997) The impact of Capital Market Developments on accounting regulatory policy in emerging markets: A Study of ASEAN. *Research in Accounting Regulation*, Supplement 1, 3-48.
- Smith, MA. Attitudes toward International Harmonization Efforts: A Cross-Cultural Study, PhD thesis at the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College (Ann Arbor: University Microfilms International, 1992)
- Steven M. Mintz. (1980). Internalization of the Accounting Curriculum. *The International Journal of Accounting Education & Research*, Vol.16 No.1 pp.137-152.
- Tang, Q. (1994). Economic Consequences of the International Harmonization of Accounting Standards: Theory and its Chinese Application, *International Journal of Accounting* pp. 146-160.

Teresa L. Canover, Stephen Salter & John E. Price. (1994). International Accounting Education: A Comparison of Course Syllabi and CFO Preferences, Issues in Accounting Education, Vol 9 No. 2 pp.259-270.

Tondkar Rasoul H, Ajay Adhikari, Edward N. Coffman (1994), Adding an International Dimension to Upper-Level Financial Accounting Courses by Utilizing Foreign Annual Reports, Issues in Accounting Education, vol 9 no.2 fall, pp. 271-281

Web-sites

<http://www.deloitteap.com>

<http://www.finex.org.ph/>

<http://www.iasc.org.uk> <http://www.iasplus.com/country/indonesia.htm>

<http://www.iasplus.com/country/malaysia.htm>

<http://www.iasplus.com/country/philippi.htm>

<http://www.iasplus.com/country/singapor.htm>

<http://www.iasplus.com/country/thailand.htm>

http://www.sec.or.th/english_version/about_the_sec/history/historye.html

<http://www.ses.com.sg>

<http://en.wikipedia.org>

<http://www.us-asean.org/arthur/Thailand>

<http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com/2008/06/apakah-kita-siap-adopsi-ifrs.html>

<http://www.ifac.org/>

<http://www.worldbank.org/ifa/rosco.html>

http://consulting.masli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:asean-federation-of-accountants-afa&catid=1:latest-news&Itemid=5